

KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI TENGAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

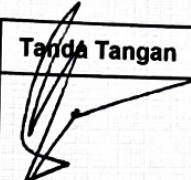
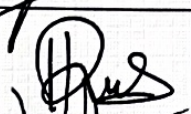


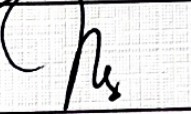

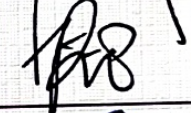
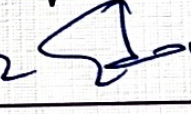
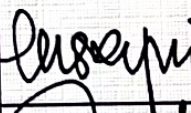

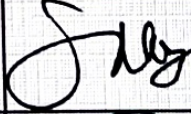

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

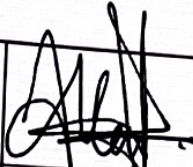


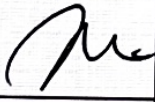


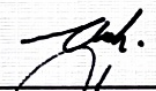

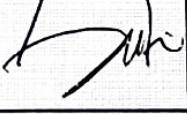
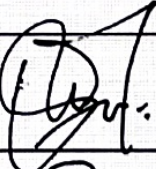
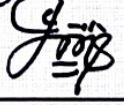
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Kabupaten Banggai
3. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
5. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
6. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
7. Pemerintah Kabupaten Poso
8. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
9. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
10. Pemerintah Kota Palu
11. Pemerintah Kabupaten Morowali
12. Pemerintah Kabupaten Buol
13. Pemerintah Kabupaten Donggala
14. Pemerintah Kabupaten Sigi

Secara bersama-sama bersepakat dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersepakat untuk tidak mengoperasikan aplikasi sejenis bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan SP4N-LAPOR!
2. Membuat Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan pada level instansi sebagai turunan dari Roadmap SP4N 2020-2024
3. Proaktif dalam peningkatan pengelolaan SP4N-LAPOR! melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pendampingan secara berjenjang dengan melibatkan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! yang terdiri dari Admin Instansi dan Pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan.
5. Berkomitmen memberikan tindak lanjut yang berkualitas terhadap seluruh laporan yang diterima dan memanfaatkan data pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
6. Meningkatkan partisipasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
7. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pengaduan masing-masing.
8. Hasil dari tindak lanjut kesepakatan bersama ini, akan dilakukan monev secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 juli 2022.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Palu sesuai sesuai dengan perwakilan instansi yang terlampir.

No	Instansi	Nama Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Bin Organisasi	Kepala Bin	
2	Pemerintah Kabupaten Banggai	ANALIS FEBI JAKAN POK 76	KASUBAG	
3	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	LUPER MAASI	KASUBAG	
4	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	AL FADHEL ALIF UTAMA	KASUBAG	
5	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	MAMA .S	ANALIS	
6	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	Abd. Mathalin	Kabang Dapin	
7	Pemerintah Kabupaten Poso	TRISTE MANEGB	KASUBAG	
8	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una	IKOW	KASUBAG	
9	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	M. Surya	Sek. Dis Kominfo	
10	Pemerintah Kota Palu	YETWI	Kasubag ortak	
11	Pemerintah Kabupaten Morowali	SADELI. K	KABID IKP	
12	Pemerintah Kabupaten Buol	ABDULLAH AS. MANESE	SEK. Dis Kominfo	

13.	Pemerintah Kabupaten Donggala	Mukmin		
14.	Pemerintah Kabupaten Sigi	ARIF, A. M. G.	KADAK ORGANISASI	
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng	Muhammad SE M M	Kasi PTK SMK	
16.	Dinas Kesehatan Prov. Sulteng	ZAMRIAH	STAF	
17.	Dinas Sosial Prov. Sulteng	Anu Lestari	Staf	
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sulteng	Nasir, J. S. M. G.	Kabag Kepegawaian	
19.	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng	ANDI HADYANI		
20.	Dinas Perhubungan Prov. Sulteng	ANDI HADYANI	STAF KEPEKAWAIA	
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng	NANI PUJI ASTUTI	STAF KEPEG	
22.	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng	ANDRIYANSYA	STAF PROGRAM	
23.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulteng			
24.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulteng	DAMBAANG A		
25.	RSUD UNDATA	CHITRA Deka		

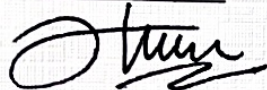
26.	UPT. Pendapatan Daerah Wil. I Palu	IMPAK ALTA	BARENDA	/k.
-----	---------------------------------------	------------	---------	-----

Mengetahui,

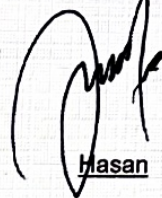
an. Asisten Deputi Transformasi Digital
Pelayanan Publik Kementerian PANRB

an. Kepala Pusat Penerangan
Kementerian Dalam Negeri

Ponco Imam Prayitno

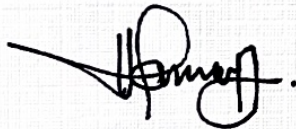


Wakil Ketua Ombudsman RI

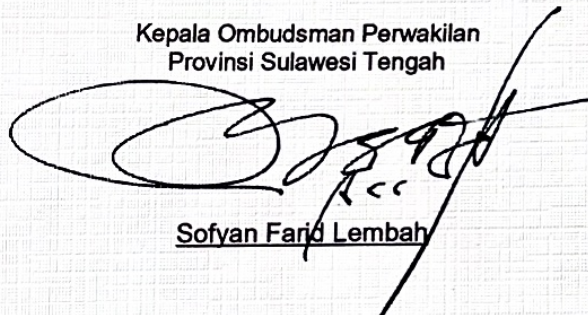


Hasan

Kepala Ombudsman Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah



Bobby Hamzar Rafinus



Sofyan Farid Lembah